

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada OPD-OPD di Kabupaten Kuantan Singingi)**

Fajriana Salami.JS¹⁾, Yusralaini²⁾, Rheny Afriana Hanif³⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email: Fsalamijs@yahoo.com

*Factors Affecting Report Quality Local Government Finance (Empirical
Study on OPDs in Kuantan Singingi Regency)*

ABSTRACT

This study aims to determine and examine the factors that affect the Quality of Local Government Financial Reports. The factors tested in this study were the application of government accounting standards, human resource competencies, internal control systems, and work experience. The source of data used in this study is primary data and data collection is carried out directly using a questionnaire which is measured using a Likert scale. The population in this study were all OPD in Kuantan Singingi Regency, totaling 22 OPD. The total sample of this study was 110 respondents which consisted of the head of SKPD, secretary, head of the finance sub-section, revenue treasurer and expense treasurer with the sampling technique, namely purposive sampling. Reasons to use purposive sampling because the information to be taken is based on a source that is deliberately selected based on predetermined criteria. Data analysis using multiple linear regression which was processed with the help of SPSS version 25.00 program. The results of this study indicate that the application of government accounting standards, human resource competencies, and internal control systems have a significant effect on the quality of local government financial reports. While Work Experience does not significantly affect the Quality of Local Government Financial Reports.

Keywords: Implementation of Government Accounting Standards, Human Resources Competence, Internal Control System, and Work Experience

PENDAHULUAN

Seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara, maka penting untuk dilakukan perubahan-perubahan untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Dengan itu, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai laporan keuangan agar tercipta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang benar. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, yang bertujuan agar pemerintahan pusat maupun daerah, dapat memberikan

bentuk pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan yang baik dan dapat dipahami.

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) setiap tahunnya akan memperoleh penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan strata tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap suatu laporan keuangan, artinya entitas tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2019 oleh BPK RI terhadap 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 443 LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 86 LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 13 LKPD. Meskipun secara umum kualitas LKPD mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, LKPD yang mendapatkan opini WTP masih memiliki kekurangan atau kelemahan yang dapat dilihat dari temuan-temuan berupa: permasalahan pencatatan belum dilakukan dengan baik atau tidak akurat, kebijakan dan aturan belum dilaksanakan secara maksimal, belum diterapkannya sistem pengendalian yang baik, dan perencanaan kegiatan belum memadai. (www.bpk.go.id)

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menilai laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah disajikan secara wajar. Meskipun dalam beberapa hal masih terdapat temuan yaitu mengenai pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan oleh BPK berupa: 1) Penataan kas belum dilaksanakan dengan tertib; 2) Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum tertib; 3) Denda atas keterlambatan belum dikenakan pada beberapa pekerjaan atau belum di setor ke kas daerah; dan 4) Terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik serta

pengadaan barang dan jasa. (riau.bpk.id).

Karena tidak tercapainya kondisi yang ideal pada laporan keuangan pemerintah daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan Pengalaman Kerja.

Faktor yang pertama adalah Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2020 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan baik pusat maupun daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wibawa dkk (2017) dan Djawang (2019) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah (SAP) memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, pada penelitian Jatmiko *et al* (2020) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor yang kedua adalah Kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya (Mangkunegara, 2012:40). Berdasarkan penelitian yang dilakukan

oleh Penelitian Harlinda (2016), Mulia (2019) dan Litaly (2020) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dalam Penelitian Suhardjo (2019) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor yang ketiga adalah sistem pengendalian internal (SPI). Sistem Pengendalian internal pada Pemerintah Pusat dan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian internal pemerintah memiliki fungsi untuk memberi keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap undang-undang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wuriasih (2019) dan Jatmiko *et al* (2020) menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pada penelitian Pradipa dan Munidewi (2018) menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Faktor yang keempat adalah pengalaman kerja. Pengalaman Kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik. Pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Atika (2019) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut penelitian Budiono (2018) pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Rizki Afri Mulia (2018) dengan judul penelitian Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus pada pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat). Dimana perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen dengan menambahkan variabel independen yaitu standar akuntansi pemerintah (SAP) dan pengalaman kerja. Perbedaan lainnya yaitu pada lokasi penelitian yang dilakukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian Handayani (2020) akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, tidak selamanya agen mengikuti keinginan prinsipal sehingga imbalan berupa insentif diberikan kepada agen dengan harapan agen akan melakukan pekerjaan/tindakan sesuai keinginan prinsipal. Teori agen berpendapat bahwa dalam prakteknya terdapat kepentingan yang berbeda antara prinsipal dan agen sehingga menimbulkan konflik kepentingan atau *agency problem*. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Laporan keuangan adalah salah satu bentuk alat monitoring. erkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep

yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IKI) laporan keuangan merupakan suatu penyajian struktur dari proses keuangan dan kinerja suatu entitas. Laporan keuangan pada organisasi pemerintahan merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang memberikan informasi kepada pihak lain (*stakeholder*) tentang kondisi keuangan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut adalah relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010:15). Berdasarkan

Peraturan Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan pemerintah adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi juga merupakan karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang dapat berpengaruh terhadap atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik (Wibowo, 2013:234). Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kerjanya (Mangkunegara, 2012:40).

Sistem Pengendalian Intern

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), yang dikutip oleh Susanto (2013:103) menyatakan bahwa pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas operasional, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.

Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja adalah tingkat proses pembentukan penguasaan

pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. Pengalaman kerja seseorang dalam suatu pekerjaan yang dimanifestasikan dalam jumlah masa kerja akan dapat meningkatkan kemampuan dan kecakapan kerja.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang sesuai dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan penentu atas kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Menurut Syahrani (2018) penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena jika standar akuntansi pemerintah (SAP) sudah diterapkan dalam menyusun laporan keuangan, maka akan terdapat ketelitian terhadap laporan arus kas, pengguna laporan keuangan lebih memahami laporan keuangan karena mudah dipahami dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintah (SAP), dan akan lebih mudah dalam menyajikan laporan realisasi anggaran, konsep penyajian laporan keuangan konsolidasi lebih terstruktur, informasi laporan operasional akan mudah didapat, serta keputusan yang diambil dalam penyajian laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

H1: Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi yang baik pasti akan mampu bekerja secara optimal dengan demikian segala tujuan pemerintah daerah dapat tercapai dan berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan tentang akuntansi, memahami apa yang seharusnya dilaksanakan menyebabkan laporan keuangan dibuat dan disajikan sesuai dengan waktunya.

Hal ini sejalan dengan Harlinda (2016) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dikarenakan laporan keuangan merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten.

H2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian intern memiliki tujuan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yakni untuk dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan. Kualitas dari laporan keuangan dilihat dari karakteristik kualitatif antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dapat dipenuhi.

Dalam penelitian Dewi (2020)

yang menyatakan terdapat pengaruh dikarenakan dengan Penerapan pengendalian intern yang benar dan baik pada suatu pemerintahan akan dapat mencegah terjadinya penggelapan dan risiko kesalahan baik pencatatan maupun perhitungan yang nantinya akan berimbas pada kegagalan dalam pembuatan laporan keuangan dan ketidakakuratan dalam proses penyusunan.

H3 :Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengalaman dapat memunculkan potensi pada diri seseorang, seiring berjalannya waktu potensi penuh akan muncul sebagai hasil dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui. Banyak cara untuk mendapatkan pengalaman kerja, salah satunya dengan praktek dilapangan secara langsung. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh pegawai atau staf akuntansi akan sangat membantu dalam proses penyajian informasi laporan akuntansi yang berkualitas.

Dalam penelitian Atika dkk (2019) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dikarenakan Seorang pegawai yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih mengerti apa yang harus dilakukan jika menghadapi masalah pekerjaannya. Biasanya pegawai yang memiliki pengalaman kerja, akan lebih mudah menyatu dengan pekerjaannya dan meminimalisir kesalahan yang akan terjadi karena pegawai tersebut telah menguasai pekerjaan tersebut sebelumnya.

H4 : Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, lebih tepatnya pada lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk kuesioner penelitian ini direncanakan dengan membagikan kepada responden dan diisi oleh responden.

Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner terstruktur sebagai instrument penelitian di OPD pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner. Jenis skala pengukuran yang digunakan untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner dalam penelitian ini adalah skala likert.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian ini menggunakan lima variabel yang terdiri dari satu variabel terikat (Dependen), empat variabel bebas (independen). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2), Sistem Pengendalian Internal (X3), dan Pengalaman Kerja (X4). Sedangkan variabel dependen adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Indikator dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang kerangka konseptual dan dua belas PSAP yaitu PSAP 01 sampai dengan PSAP 12. Indikator kompetensi sumber daya manusia adalah pengetahuan, keterampilan dan perilaku. Indikator variabel untuk sistem pengendalian internal pemerintah dapat dilihat dari lingkungan pengendalian,

pengendalian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal. Indikator pengalaman kerja adalah jangka waktu bekerja, bidang pengalaman bekerja, dan manfaat pengalaman kerja di bidang keuangan/akuntansi. Indikator kualitas laporan keuangan adalah relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang dikenal sebagai kota jalur. Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya adalah beberapa kecamatan dibawah Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Kuantan Singingi dan tepatnya pada OPD-OPD pada pemerintahan tersebut.

Organisasi perangkat daerah merupakan organisasi yang berada di pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kemudian di kabupaten Kuantan Singingi sendiri terdapat 22 OPD yang masing-masingnya dikepalai oleh kepala SKPD.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah OPD Kabupaten Kuantan Singingi. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi dengan jumlah 22 OPD. Pada masing-masing OPD akan di pilih 5 responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dari kuesioner yang dikirimkan sebanyak 110, jumlah yang dikembalikan sebanyak 105 (95,5%), dan kuesioner tidak kembali sebanyak 5 (5%).

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Laporan Keuangan	105	61	80	70.81	4.158
Penerapan SAP	105	67	95	80.88	5.267
Kompetensi SDM	105	57	79	66.10	4.240
SPI	105	74	100	86.06	5.138
Pengalaman Kerja	105	16	25	21.49	1.897
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Data Olahan, SPSS 25, 2021

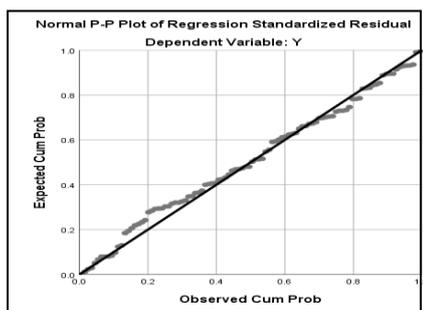
Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif diatas variabel kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen mempunyai nilai minimum sebesar 61, dan maksimum sebesar 80, dengan nilai rata-rata sebesar 70,81 serta standar deviasi sebesar 4.158. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai variabel independen mempunyai nilai minimum sebesar 67, dan nilai maksimum sebesar 95, dengan nilai rata-rata sebesar 80,88 serta standar deviasi sebesar 5,267. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel independen mempunyai nilai minimum sebesar 57, dan nilai maksimum sebesar 79, dengan nilai rata-rata sebesar 66,10 serta standar deviasi sebesar 4,420. Variabel Sistem Pengendalian Inten sebagai variabel independen mempunyai nilai minimum sebesar 74, dan nilai maksimum sebesar 100, dengan rata-rata sebesar 86,06 serta standar deviasi sebesar 5,138. Variabel pengalaman kerja sebagai variabel independen mempunyai nilai minimum sebesar 16, dan nilai maksimum sebesar 25, dengan rata-rata sebesar 21,49 serta standar deviasi sebesar 1,897.

Hasil Uji Kualitas Data

Berdasarkan hasil validitas yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pengalaman kerja memiliki kriteria valid untuk setiap item pernyataan, hal ini terlihat dari nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel $\alpha 5\% = 0.192$. Karena semua item pernyataan dari masing-masing variabel sudah dinyatakan valid maka item pernyataan semua variabel dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas dapat dilihat bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai Cronbach's Alpha $> 0,60$.

Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah nilai residual pada model regresi telah terdistribusi normal atau tidak. Jika nilai residual terstandarisasi dan mendekati nilai rata-ratanya maka dapat dikatakan normal. Pada penelitian ini, pengujian normalitas data dapat dilihat dari hasil uji normal probability plot dan uji *one sample kolmogorov-smirnov*.



Gambar 1
Grafik P-Plot

Dengan melihat grafik P-Plot diatas maka dapat disimpulkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Grafik P-Plot tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak

untuk digunakan karena memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan melihat nilai statistik. Berikut tabel *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan membandingkan *Asymptotic Significance > 5%*.

Tabel 2
Hasil Pengujian Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.37696308
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.047
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.145 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,145 lebih besar dari 0,05. Sehingga variabel penelitian ini dapat dikatakan berdistribusi normal.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas pada penelitian ini dapat ditentukan dengan menggunakan nilai *tolleracace* $> 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 .

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistic		
	Tolerance	VIF	Keterangan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	0,764	1.309	Tidak terdapat Multikolinieritas
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	0,818	1.222	Tidak terdapat Multikolinieritas
Sistem Pengendalian Intern (X3)	0,547	1.827	Tidak terdapat Multikolinieritas
Pengalaman Kerja (X4)	0,555	1.800	Tidak terdapat Multikolinieritas

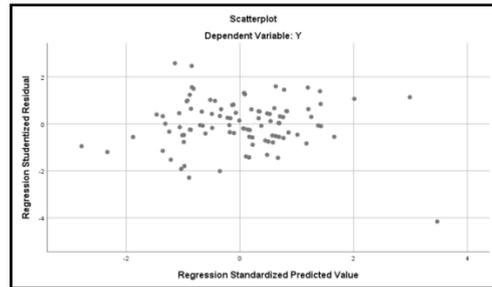
Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan yang diperoleh adalah nilai *tollerance* seluruh variabel independen $> 0,10$ dengan $VIF < 10$. Sehingga dapat simpulkan seluruh variabel penelitian bebas dari pengaruh multikolinieritas.

2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain yang terdapat dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada sutau model dapat dilihat dari pola *scatterplot*. Apabila pola *scatterplot* membentuk pola tertentu, maka model regresi memiliki gejala heterokedastitas.



Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa titik- titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang beraturan, serta tersebar secara acak diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Uji Multikolinieritas Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda berguna untuk memperoleh gambaran nmenyeluruh mengenai pengaruh variabel bebas.

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	26.584	7.600		3.498	.001
	Penerapan SAP	.274	.076	.347	3.588	.001
	Kompetensi SDM	.210	.091	.214	2.314	.023
	SPI	.640	.132	.414	4.704	.000
	Pengalaman Kerja	.090	.235	.041	.383	.702

Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel 5.16 hasil analisis dengan menggunakan SPSS 25 maka didapat persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1X + \beta_2X + \beta_3X + \beta_4X + e$$

$$Y = 26.584 + 0,274X_1 + 0,210X_2 + 0,640X_3 + 0,90X_4 + e$$

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pengalaman Kerja) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Kualitas Laporan Keuangan). Uji F dilakukan dengan membandingkan F hitung dan F tabel dengan nilai Alpha < 0,05.

Tabel 5
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	385.551	4	96.388	8.117	.000 ^b
	Residual	1151.792	97	11.874		
	Total	1537.343	101			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3						

Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua variabel mempunyai nilai signifikansi ($0.000 < 0,05$) yang berarti bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pengalaman Kerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana persentase variabel independen

secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai ($= 1$ berarti variabel-variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen). Jika ($= 0$ berarti variabel independen tidak mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen).

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.527 ^a	.278	.249	3.603
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan				

Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2021

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan bahwa t hitung $> t$ tabel yaitu $3,588 > 1,984$ dengan nilai signifikansi $0,001$, maka dapat disimpulkan **H1 diterima** yaitu Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan Standard akuntansi pemerintah berperan sebagai pedoman yang harus dipatuhi dan dijadikan acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Apabila standar akuntansi pemerintah telah dipahami maka akan dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan penerapan standar akuntansi pemerintah

yang baik, maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dimana laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam pengolaan keuangan daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Djwang (2019) yang menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. selain itu, penelitian ini juga di perkuat oleh penelitian Wibawa dkk (2017) juga menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko dkk (2020) menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukan bahwa t hitung $>$ t tabel yaitu $2,314 > 1,984$ dengan nilai signifikansi $0,023$, maka dapat disimpulkan **H2 diterima** yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan pemerintahh wajib dikelola oleh aparat yang berkompeten yang bertanggung jawab atas pekerjaannya dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai prasyarat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang harus dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang

diperlukan dalam mengerjakan pekerjaannya. Karena, sumber daya manusia yang berkompeten akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan OPD dengan baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mulia (2019) yang menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan diperkuat oleh penelitian Litualy (2020) juga menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Suhardjo (2019) menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga menunjukan bahwa t hitung $>$ t tabel yaitu $4,704 > 1,984$ dengan nilai signifikansi $0,000$ maka dapat disimpulkan **H3 diterima** yaitu Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. berpengaruhnya sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan dikarenakan Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah perlu melalui proses dan tahap-tahap yang diatur dalam sistem akauntansi pemerintah daerah yang didalamnya mengatur mengenai sistem pengendalian intern (SPI). Kualitas suatu laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang terdapat pada pemerintahan, hal ini disebabkan sistem pengendalian intern memiliki tujuan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, agar dapat mengurangi risiko adanya kekeliruan dan kesalahan pencatatan maupun perhitungan dalam akuntansi. Dengan demikian, sistem pengendalian internal merupakan fondasi *good*

governance dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wuriasih (2019) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. selain itu, dapat diperkuat oleh penelitian Jatmiko *et al* (2020) yang juga menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern turut berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun, dalam penelitian Pradipa (2018) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat menunjukan bahwa t hitung $<$ t tabel yaitu $0,383 < 1,984$ dengan nilai signifikansi $0,702$, maka dapat disimpulkan **H4 ditolak** yaitu Pengalaman Kerja tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tidak berpengaruhnya pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan dikarenakan pegawai/staf keuangan baik yang pengalamannya sudah lama atau yang belum lama bisa menghasilkan laporan keuangan dengan baik disebabkan para pegawai/staf keuangan tersebut mengikuti pelatihan/diklat keuangan sehingga memiliki pemahaman yang baik mengenai penyajian dan penyusunan laporan keuangan dan dapat menyelesaikan penyajian laporan keuangan tepat waktu serta menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan dengan adanya pelatihan/diklat keuangan akan dapat membantu pegawai/staf keuangan, baik pegawai baru maupun pegawai lama untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan

keterampilan mereka pada bidangnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2021) dan Budiono (2018) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Atika (2019), dan Dermawan (2017) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji Regresi Linear Berganda dalam SPSS versi 25.00 dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini adalah tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian ini, dikarenakan kesibukkan dari masing-masing responden dan dalam penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen dan satu variabel dependen yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu bagi akademis diharapkan dapat menambahkan variabel independen lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah. Bagi pemerintah sebaiknya pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi lebih disiplin dalam meningkatkan kebijakan/SOP yang digunakan sebagai pedoman melaksanakan tugas dan tanggung jawab, agar dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan secara lebih optimal. Lalu sebaiknya pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi turut melakukan pengujian bersama inspektur atas item pekerjaan yang terindikasi tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel agar tingkat keterwakilan anggota populasi semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atika, Junaidi, I. (2019), “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengalaman kerja serta peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Medan”, *Jurnal Warta*, hal. 79.
- Bastian, I. (2010), *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Budiono, V.S., Muchlis, M. dan Masri, I. (2018), “Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan, Pengalaman Kerja Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Depok)”, *Jurnal Wahana Akuntansi*, Vol. 13 No. 2, hal. 110–128.
- Dewi, G.. K.P.E.D.M.D. (2020), “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD) dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, *Jurnal Akuntansi Profesi*, Vol. 11 No. 137–147.
- Djawang, R.R.P. (2019), “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”, *Riset Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 7 No. 2, hal. 1–12.
- Handayani, F. 2020, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara.
- Harlinda, H. (2016), “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau)”, *Sorot*, Vol. 11 No. 2, hal. 127.
- Jatmiko, B., Irawan, D., MacHmuddah, Z. dan Laras, T. (2020), “Factors affecting regional government financial statements: Evidence from Indonesia”, *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 9 No. 2, hal. 89–100.
- Litaly, J.W. (2020), “Analisis Faktor Faktor yang

- Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon”, *Jurnal Kalwedo Sains (KASA)*, Vol. 1 No. 1, hal. 42–49.
- Mangkunegara, A.P. (2012), *Evaluasi Kinerja SDM*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mulia, R.A. (2019), “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat)”, *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 9 No. 1, hal. 7.
- Pradipa, N.A. dan Munidewi, B. (2018), “Pengaruh Spi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Dan Kompetensi Sdm Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Skpd Provinsi Bali)”, *Behavioral Accounting Journal*, Vol. 1 No. 1, hal. 50–61.
- Setiawan, F. (2021), “Pengaruh Pengalaman Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Kompetensi Akuntan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, *Executive Summary*, Vol. 18 No. 1, hal. 50–53.
- Wibawa, K.A.S., Sinarwati, N.K. dan Yuniarta, G.A. (2017), “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Buleleng”, *e-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 2 No. 8.
- Wibowo. (2013), *Manajemen Kerja*, 3 ed., PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wuriasih, A. (2019), “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Manokwari)”, *Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol. 14 No. 1, hal. 17– 41.
- www.bpk.go.id. (n.d.). “badan pemeriksa keuangan n RI”, tersedia pada: <https://www.bpk.go.id/>.
- Www.Bpk.Go.Id. (N.D.). “Badan Pemeriksa Keuangan N Ri”, Tersedia Pada:<https://Www.Bpk.Go.Id/>.
- <https://Riau.Bpk.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2020/06/Siaran-Pers-Penyerahan-Lhp-Kuansing-Inhil-Pekanbaru-Th-2019.Pdf>
- [https://Www.Bpk.Go.Id/News/Penyerahan - Ihps-I- Tahun-2019-Dari-Bpk- Kepada-Dpd](https://Www.Bpk.Go.Id/News/Penyerahan-Ihps-I-Tahun-2019-Dari-Bpk-Kepada-Dpd)